

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo pada masa sebelum dan sesudah otonomi daerah ditinjau dari derajat otonomi fiskal. Rasio sesudah otonomi lebih tinggi dibanding sebelum otonomi daerah. Namun peningkatan tersebut masih dikatakan sangat kurang karena berada di bawah 10%.
2. Terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo pada masa sebelum dan sesudah otonomi daerah ditinjau dari efisiensi. Persentase rasio efisiensi sesudah otonomi lebih tinggi dibanding sebelum otonomi sebelum otonomi daerah lebih efisien dibanding sesudah otonomi daerah. daerah. Namun jika diukur dari skala efisiensi, kinerja keuangan kabupaten gorontalo sebelum otonomi daerah lebih efisien dibanding setelah otonomi daerah.
3. Tidak terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo pada masa sebelum dan sesudah otonomi daerah ditinjau dari perkembangan anggaran. Hal ini disebabkan oleh terjadinya fluktuasi atas PAD baik sebelum maupun sesudah otonomi daerah. Meskipun demikian, rasio sesudah otonomi lebih tinggi dibanding sebelum otonomi daerah.

4. Terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo pada masa sebelum dan sesudah otonomi daerah ditinjau dari kemampuan keuangan daerah. Jika ditinjau dari skala interval, kemampuan keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi, keduanya termasuk dalam kategori sangat baik karena persentasenya berada diatas 50%. Meskipun demikian Kemampuan keuangan daerah sesudah otonomi daerah jauh lebih tinggi dibanding sebelum otonomi daerah. sedangkan jika ditinjau dari kemampuan rutin daerah, tidak terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo baik sebelum maupun sesudah otonomi daerah. Meskipun persentase rasio kemampuan rutin daerah setelah otonomi sedikit lebih tinggi dibanding sebelum otonomi, namun jika ditinjau dari skala interval kemampuan keuangan daerah, keduanya dikatakan sangat kurang karena berada di bawah angka 10%.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan simpulan diatas maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Sebagai daerah yang telah menerapkan otonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo hendaknya melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Untuk meningkatkan derajat otonomi fiskal pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) untuk mengimbangi belanja daerah yang terus meningkat setiap

tahunnya. Salah satu cara untuk meningkatkan PAD adalah mengefektifkan pemungutan pajak atau retribusi dan mengefisienkan cara pemungutannya pada objek dan subyek yang sudah ada. Misalnya dengan melakukan perhitungan potensi, penyuluhan, meningkatkan pengawasan dan pelayanan.

- b. Untuk efisiensi pengeluaran, pemerintah diharapkan mampu meminimalisir pengeluaran daerah yang berlebihan untuk membiayai administrasi pemerintah. Contohnya meminimalisir biaya perjalanan dinas serta mengurangi kegiatan seperti seminar dan sejenisnya yang tidak terlalu bermanfaat. Hal ini perlu dilakukan sebab jika pengeluaran lebih besar dari pendapatan akan menimbulkan defisit anggaran.
- c. Untuk Perkembangan anggaran daerah disarankan agar PAD yang diperoleh dialokasikan pada belanja modal yang berorientasi pada sektor penerimaan sehingga dapat meningkatkan produktivitas daerah yang nantinya akan berujung pada peningkatan PAD. Sehingga laju pertumbuhan Pendapatan terus meningkat setiap tahunnya.
- d. Untuk kemampuan keuangan daerah, pada dasarnya kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Gorontalo sudah baik. Namun, hal tersebut hanya ditunjang oleh dana perimbangan. Ini berarti kemandirian daerah sebagai daerah otonom belum bisa dikatakan baik karena masih bergantung pada pemerintah pusat. oleh sebab

itu, pemerintah Kabupaten Gorontalo diharapkan mampu meningkatkan PAD dengan cara seperti yang tercantum dalam poin a dan c, sehingga dapat menurunkan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian pada daerah-daerah yang baru menerapkan kebijakan otonomi daerah agar hasil penelitian tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang terkait untuk meningkatkan kinerja keuangan di daerahnya. Selain itu disarankan untuk menambahkan rasio efektifitas dan rasio aktivitas untuk lebih memaksimalkan hasil penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Mhd. Karya Satya. 2008. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah*, Tesis, Departemen Akuntansi Sekolah Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Bastian, Indra. 2001. *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah, BPFE*. Yogyakarta.
- Bursa Anggaran Daerah. *Analisis Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Gorontalo*. Oleh: Aulia Rohman. Diakses Tanggal 28 Juni 2014 melalui <http://bursaindonesiagorontalo.blogspot.com/?=1>
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Indeks. Jakarta.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan-kementerian Keuangan, Data Keuangan Daerah Tahun Anggaran 1996-1997.
- Ekonomi Indonesia. Diakses 18 Juni 2014. [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Ekonomi Indonesia](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Indonesia)
- Erfa, Azhir. 2008. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Setelah Otonomi Khusus (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara)*. DI. Aceh.
- Halim, Abdul. 2001, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP. STIM. YKPN.
- , 2002. *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- , 2004. *Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: UPP. AMP. YKPN.
- , dkk. 2012, *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP. STIM. YKPN.
- Harahap, Sofyan Safri. 2011. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Indriyo, Gitosudarmo. 1999. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Janur, Martha Yurdila. 2009. *Analisis terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Bungo Sesudah Otonomi Daerah tahun 2003- 2007*. Sumatera Utara Medan.
- Kuncoro, Mudrajat. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

- Lubis, Silviyani. 2005. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II Provinsi Sumatra Utara Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah*. Provinsi Sumatra Utara.
- Mahsun, Mohammad. Dkk. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- \_\_\_\_\_, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Good Governance, Democratization, Local Government Financial Management, Edisi Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- \_\_\_\_\_, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Munir, Dasril. Dkk. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 pasal 4 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1..
- Pratama, Adipta Nur. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah pada Masa Otonomi Daerah*. Provinsi DKI Jakarta
- Profil Kabupaten Gorontalo. Diakses 15 Juni 2014. [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Gorontalo](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gorontalo)
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1954 Tentang *Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development)*.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah*.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang *Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Standar Akuntansi Pemerintahan. 2011. *Peraturan Pemerintah Republik In donesia Nomor 71 Tahun 2010*. Bandung: Fokusmedia.

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

\_\_\_\_\_, 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Umems Indonesia. Implikasi Putusan MK terhadap Netralisasi PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah. Oleh: Umam Heru. Dakses tanggal 18 Juli 2014 melalui <http://umemsindonesia.blogspot.com/?m=1>

Wahyuni, Nanik. 2012. *Analisis Rasio untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah*. Kota Malang.